

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada awal tahun 2020, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan, termasuk Indonesia. Perihal tersebut disebabkan karena wabah yang melanda seluruh Indonesia, yaitu adanya *Coronavirus Disease*. *Coronavirus* adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Dengan adanya *coronavirus* ini yang melanda di seluruh negara di dunia, sekitar 200 negara lebih yang terkena wabah ini. Sehingga, pada tanggal 30 Januari 2020 *World Health Organization* menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pada tanggal 11 Maret 2020 Organisasi kesehatan Dunia (WHO) resmi mengumumkan bahwa wabah *Coronavirus* sebagai pandemi global. *Coronavirus* (COVID-19) ini memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi yang berupa menurunnya tingkat perekonomian dunia terkhusus Indonesia (Indayani & Hartono, 2020).

Dampak dari adanya virus Covid-19 ini sangat besar terutama pada perekonomian Indonesia. Virus tersebut menjadi penyebab utama terjadinya krisis ekonomi. Dalam mengurangi penyebaran virus tersebut Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai jenis kebijakan. Salah satu kebijakan tersebut adalah pembatasan aktivitas masyarakat, seperti lockdown, *physical distancing*, Pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan pengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga ekonomi di Indonesia mengalami defisit. Pembatasan dalam ruang gerak masyarakat Indonesia mengakibatkan aktivitas perekonomian menurun, terbatasnya mobilitas barang dan jasa, permintaan dan penawaran atas barang dan jasa menurun, dan lain-lain

sehingga pendapatan di berbagai sector ekonomi di Indonesia menurun (Karina et al., 2021).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Perekonomian Indonesia tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US\$4.783,9. menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat Pada triwulan IV 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tetap tinggi yakni 5,01%, di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan tahun 2022 tercatat 5,31%, jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,70%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87%. Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi.

Tabel 1.1

PDB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2012-2021

Tahun	Laju Pertumbuhan PDB (Persen)
2012	6,03
2013	5,56
2014	5,01
2015	4,88
2016	5,03
2017	5,07
2018	5,17
2019	5,02
2020	-2,07
2021	3,70

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Pertumbuhan Ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan Ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat (Mamuka et al., 2019). Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat dan kemakmuran masyarakat meningkat (Yasin, 2020).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada periode tertentu adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil (Istianto et al., 2021).

Indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Sukirno (2011), merupakan perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu daerah, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Menurut (Putra, 2018) berdasarkan hasil estimasi antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

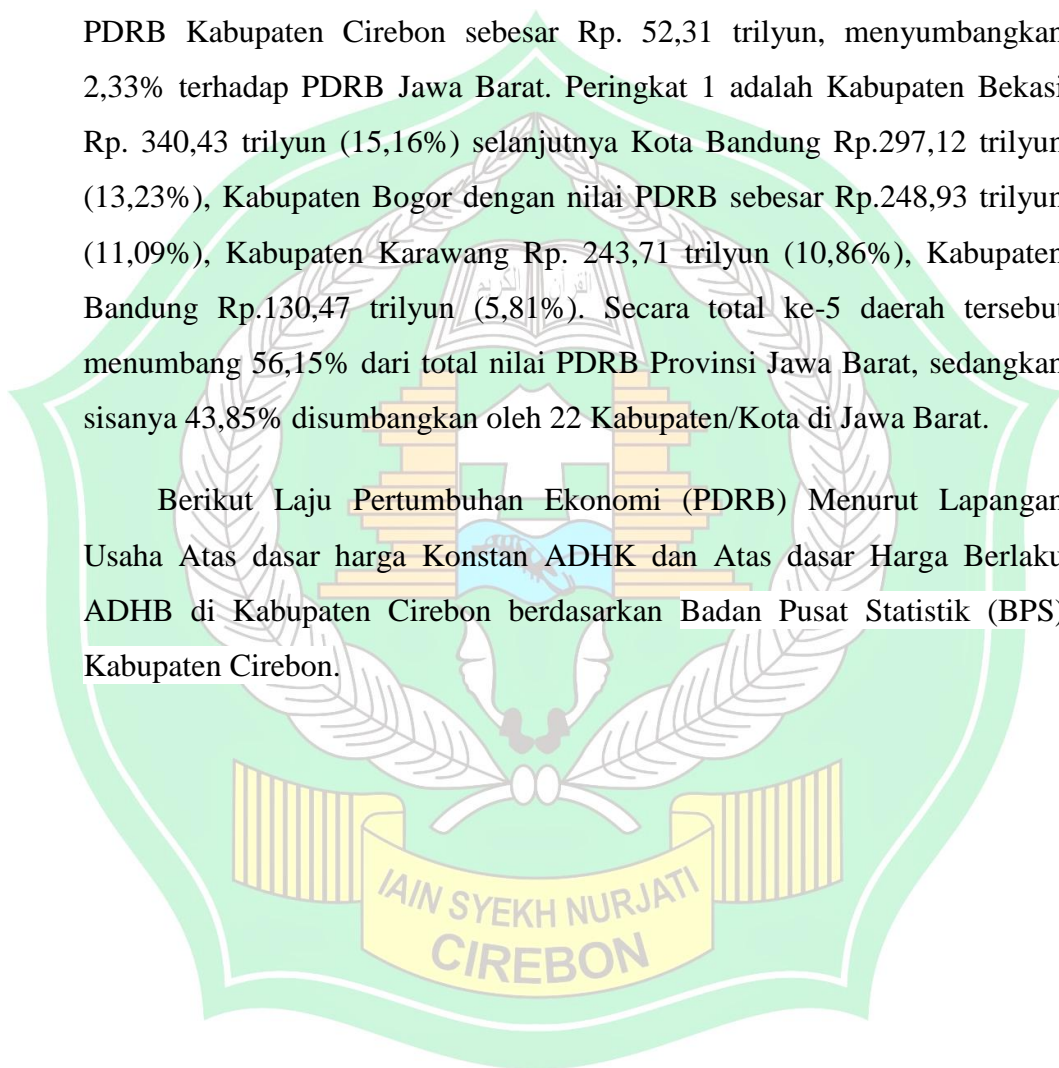
tetapi secara statistik tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa dengan desentralisasi fiskal, maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik bagi Pemerintah Daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah (Astuti, 2021). UU No 33/2004 adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini mengatur mengenai pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien serta terwujudnya pemerintahan yang demokratis. Undang-Undang ini juga mengatur tentang pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bidang pembangunan dan pemerintahan (Dasmal et al., 2020).

Kemudian pada tahun 2014 kembali direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga perubahan terakhir jatuh pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Beberapa perubahan yang diterapkan melalui Undang-Undang ini meliputi perubahan atas pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan daerah, serta pengawasan dan pengendalian pemerintahan daerah. Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah (Idul Rihsan & LM, 2020).

Perkembangan perekonomian Kabupaten Cirebon, diukur dengan beberapa indikator ekonomi salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cirebon, Berdasarkan Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon perbandingan nilai PDRB atas dasar harga berlaku di 27 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat nilai PDRB Kabupaten Cirebon tahun 2021 peringkat 12 di Jawa Barat. Nilai PDRB Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 52,31 trilyun, menyumbangkan 2,33% terhadap PDRB Jawa Barat. Peringkat 1 adalah Kabupaten Bekasi Rp. 340,43 trilyun (15,16%) selanjutnya Kota Bandung Rp.297,12 trilyun (13,23%), Kabupaten Bogor dengan nilai PDRB sebesar Rp.248,93 trilyun (11,09%), Kabupaten Karawang Rp. 243,71 trilyun (10,86%), Kabupaten Bandung Rp.130,47 trilyun (5,81%). Secara total ke-5 daerah tersebut menumbang 56,15% dari total nilai PDRB Provinsi Jawa Barat, sedangkan sisanya 43,85% disumbangkan oleh 22 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Berikut Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas dasar harga Konstan ADHK dan Atas dasar Harga Berlaku ADHB di Kabupaten Cirebon berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon.



Tabel 1.2

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Konstan dan Atas dasar Harga Berlaku Kabupaten Cirebon Tahun 2012-2021

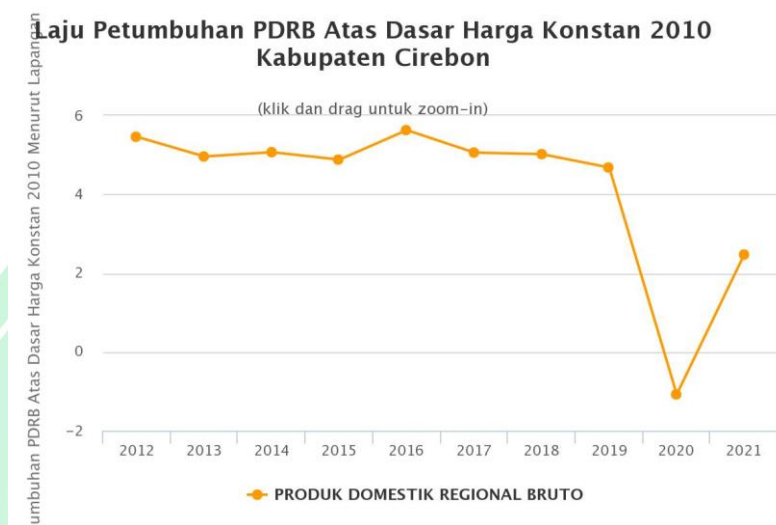
Tahun	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)
2012	23.857,75	26.297,83	5,46
2013	25.042,25	29.410,72	4,96
2014	26.312,99	32.579,05	5,07
2015	27.596,25	35.734,65	4,88
2016	29.149,31	38.840,77	5,63
2017	30.623,31	41.919,30	5,06
2018	32.161,84	45.499,28	5,02
2019	33.668,10	49.135,81	4,68
2020	33.304,05	49.561,56	-1,08
2021	34.127,52	52.309,94	2,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon (2022)

Dilansir dari (BPS) Kabupaten Cirebon, Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat pertumbuhan PDRB secara riil. Jadi jika disebut pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan ekonomi) maka perhitungannya berdasarkan atas dasar harga konstan (PDB/PDRB atas dasar harga konstan). Sedangkan penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung dikenal ada tiga macam pendekatan penghitungan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Sedangkan metode tidak langsung diperlukan dalam penghitungan PDRB jika data tidak tersedia (belum lengkap). Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi menggunakan indikator produksi yang sesuai, seperti: jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya.

Berikut Grafik data Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Cirebon Berdasarkan Atas dasar harga Konstan Dalam Bentuk Grafik.

Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Cirebon Tahun 2012-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon (2022)

Dalam penelitian (Arina et al., 2019). Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah pengeluaran pemerintah (*government expenditure*). Besar kecilnya pengeluaran pemerintah sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh pemerintah itu sendiri dalam kurun waktu tertentu. Di era otonomi daerah maka sumber pendapatan daerah terdiri atas PAD, DBH, DAU, dan DAK. Semakin besar pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah akan semakin baik sebab mempengaruhi secara positif pembiayaan pembangunan ekonomi di daerah, dalam arti bahwa belanja pemerintah untuk pembangunan ekonomi juga akan semakin besar sehingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan.

Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat suatu negara merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang merupakan representasi visual dan

indikator utama kesehatan ekonomi suatu negara (Fajri et al, 2022). Kemakmuran adalah kemampuan dalam mencukupi suatu kebutuhan daerah. Tingkat kemakmuran dapat diukur dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibandingkan dengan total Pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan terbesar yang ada di APBD yang berperan menanggung sebagian besar belanja daerah (Rani Wulantari et al., 2021). Apabila pendapatan asli daerah tinggi maka hal tersebut mencerminkan bahwa suatu daerah semakin makmur (Febriyanti, 2019 dalam Aafiah Millenia, 2022).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Worumi H, 2018).

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah, karena dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan/kemakmuran masyarakat dan kemajuan daerah. Oleh karena itu, peningkatan PAD menjadi salah satu prioritas penting bagi pemerintah daerah dalam upaya memperkuat keuangan daerah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Asih S, 2018).

Tabel 1.3
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Cirebon Tahun 2012-2021

Tahun	PAD (Juta Rupiah)
2012	229.993,23
2013	250.849,41
2014	452.870,53
2015	478.690,10
2016	529.050,29
2017	779.337,85
2018	584.810,84
2019	639.841,34
2020	616.616,82
2021	671.636,20

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon (2022)

Intergovernmental revenue atau dana perimbangan adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap anggaran pendapatan belanja daerah. Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, menyebutkan bahwa *intergovernmental revenue* adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka desentralisasi. Menurut Budianto dan Alexander, 2016 dalam (Astu, 2021) apabila pengelolaan daerah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan dimana *intergovernmental revenue* terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah

dan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi dan dalam kebijakan fiskal, dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal (Putra, 2018).

Tabel 1.4
Dana Perimbangan Kabupaten Cirebon Tahun 2012-2021

Tahun	Dana Perimbangan DAU+DAK+DBH (Juta Rupiah)	DAU (Juta Rupiah)	DAK (Juta Rupiah)	DBH (Juta Rupiah)
2012	1.327.559,79	1.135.758,78	86.034,47	105.765,36
2013	1.488.073,46	1.280.797,12	97.245,53	110.030,81
2014	1.585.728,78	1.406.862,52	76.145,53	102.720,27
2015	1.786.901,01	1.431.944,56	185.706,72	74.024,11
2016	2.158.776,17	1.521.877,11	537.448,78	99.454,28
2017	2.074.515,21	1.495.142,63	481.489,38	97.883,20
2018	2.070.427,93	1.500.538,69	482.734,10	87.155,14
2019	2.213.789,28	1.591.291,63	547.639,58	74.858,07
2020	2.021.914,84	1.417.094,60	496.783,93	108.036,31
2021	3.957.149,38	1.759.570,84	637.045,22	291.199,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, Kabupaten Cirebon sebagai salah satu daerah di Indonesia memiliki peran penting dalam menentukan tingkat perekonomian nasional maupun daerah. Tingkat kemakmuran dan *intergovernmental revenue* merupakan faktor yang dapat

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon. Tingkat kemakmuran dapat dilihat dari tingkat pendapatan asli daerah (PAD) dan tingkat kesejahteraan masyarakat, sedangkan intergovernmental revenue adalah pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat dan dibagikan ke pemerintah daerah. Kedua faktor ini menurut penulis memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memajukan Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis skripsi dengan judul **“Pengaruh Tingkat Kemakmuran Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Cirebon”**.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam sebuah penelitian perlu adanya identifikasi yang dimaksudkan agar permasalahan di lapangan dapat diuraikan dan memudahkan peneliti dalam penelitian selanjutnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Kabupaten Cirebon akibat pandemi Covid-19.
2. Meningkatnya pengangguran karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena pandemi Covid-19, sehingga banyak perusahaan yang mengadakan pemutusan hubungan kerja kepada beberapa pegawainya demi mengurangi kerugian yang lebih besar.
3. Pendapatan asli daerah menurun hal ini karena jumlah wisatawan menurun karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
4. Transfer dana dari pusat ke daerah (*intergovernmental revenue*) untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon.
5. Bagaimana Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengelola keuangan daerahnya.

1.3 BATASAN MASALAH

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pendapatan yang diterima daerah baik itu Pendapatan Asli Daerah maupun pendapatan dari pusat ke daerah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Masalah yang dibahas mengenai tingkat kemakmuran yang diukur dengan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
2. Masalah yang dibahas mengenai Transfer dana dari pusat ke daerah (*intergovernmental revenue*) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diketahui beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Apakah Tingkat Kemakmuran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon?
2. Apakah *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon?
3. Apakah Tingkat Kemakmuran dan *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Seberapa besar pengaruh tingkat kemakmuran terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon.
2. Untuk menganalisis seberapa besar Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon.
3. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Kemakmuran dan *Intergovernmental Revenue* terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Berikut merupakan manfaat dari pada penulisan dalam pembentukan proposal skripsi adalah sebagai berikut :

1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti terhadap tingkat Pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang memengaruhinya sehingga peneliti dapat lebih memahami ilmu yang telah dipelajari.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan program yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan memberikan informasi bagi masyarakat mengenai tingkat kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon, sehingga masyarakat dapat lebih memahami situasi ekonomi daerah.

4) Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan menjadi referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik yang sama.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan adalah gambaran alur pemikiran dari awal hingga akhir. Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini tentang teori-teori yang relevan dengan variable

penelitian sebagai legitimasi konseptual. Penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kerangka berfikir pola hubungan antara variabel atau kerangka konsep yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti. Bab ini juga berisi mengenai hipotesis atau dugaan sementara yang masih perlu untuk diuji.

BAB III : Pada bab ini akan dibahas mengenai variabel penelitian dan definisi operasional variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : Pada bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, proses dan teknik analisis data, hasil dari pengujian hipotesis penelitian sesuai dengan metode yang digunakan.

BAB V : Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah diperoleh. Pada bab ini juga menjelaskan keterbatasan dan saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan penelitian.